



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 330/KMK.02/2013

TENTANG

PENETAPAN PAGU DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi Dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, dalam rangka penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN) Menteri Keuangan menetapkan Pagu Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pagu Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi Dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PAGU DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014.
- PERTAMA : Menetapkan Pagu Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2014 yang dirinci menurut unit organisasi, program, dan kegiatan untuk masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Berdasarkan penetapan Pagu Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PPA BUN menyusun RDP BUN Tahun Anggaran 2014 dengan mengacu pada:
1. Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
 2. Tata Cara Perencanaan Penetapan Alokasi dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- KETIGA : RDP BUN Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA digunakan sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Eselon I di Kementerian Keuangan selaku Pimpinan PPA BUN yang bertanggung jawab atas BA BUN yang dikelolanya.
2. Direktur Jenderal Anggaran selaku Pimpinan Mitra PPA BUN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

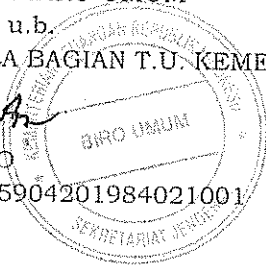
MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PAGU DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN : 999
UNIT ORGANISASI : 999.01 BA BUN PENGELOLAAN UTANG

(dalam ribuan rupiah)

BA	KODE		KEPERLUAN	JUMLAH
	UNIT ORG	PRO		
999	01	6	Program Pengelolaan Utang Negara	176.723.917.170
			1. Pembayaran Bunga Utang	119.533.446.700
			a. Utang Dalam Negeri	107.687.646.700
			b. Utang Luar Negeri	11.845.800.000
			2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang *)	57.190.470.470
			a. Dalam Negeri	285.965.000
			b. Luar Negeri	56.904.505.470

KETERANGAN:

*) Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp182.730.284.400.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

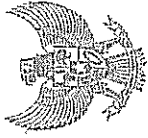
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP. 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PAGU DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

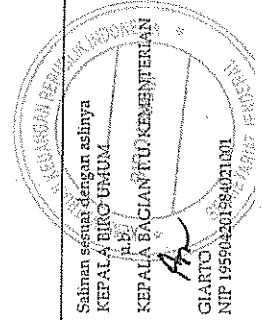
BAGIAN ANGGARAN : 999
UNIT ORGANISASI : 999.02 BA BUN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE		KEPERLUAN	JUMLAH
BA	UNIT ORG PRO		
999	02 7	Program Pengelolaan Hibah Negara	3.542.709.729
		1. Mass Rapid Transit (MRT) Project *)	2.879.398.286
		2. Hibah Air Minum **)	205.986.000
		3. Hibah Air Limbah **)	29.800.000
		4. Infrastructure Enhancement Grant (IEG)-Sanitasi **)	7.800.000
		5. Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Phase II (WISMP-2) *)	146.344.480
		6. Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province **)	54.570.963
		7. Hibah Australia Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi **)	93.360.000
		8. Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) **)	122.000.000
		9. Hibah Air Minum Tahap I **)	3.450.000

KETERANGAN:

- *) Sumber dana Pinjaman Luar Negeri
**) Sumber Dana Hibah Luar Negeri



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

PAGU DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN : 999
 UNIT ORGANISASI : 999.03 BA BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH

(dalam ribuan rupiah)

BA	KODE		KEPERLUAN	JUMLAH
	UNIT ORG	PRO		
999	03	8	Program Investasi Pemerintah	15.128.602.023
			1. Penyertaan Modal Negara	10.105.617.523
			a. PMN Kepada BUMN	8.100.000.000
			- PT Askrindo dan Perum Jamkrindo	2.000.000.000
			- PT Sarana Multigriya Finansial	1.000.000.000
			- PT Hutama Karya	5.100.000.000
			b. PMN Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional	585.617.523
			- Asian Development Bank (ADB)	390.538.924
			- International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	149.435.099
			- International Finance Corporation (IFC)	14.143.500
			- International Fund for Agricultural Development (IFAD)	31.500.000
			c. Penanaman Modal Negara Lainnya	1.420.000.000
			- ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	420.000.000
			- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1.000.000.000

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam ribuan rupiah)

KODE		KEPERLUAN	JUMLAH
BA	PRO		
		2. Dana Bergulir	4.000.000.000
		a. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDP KUMKM)	1.000.000.000
		b. Pusat Pembiayaan Perumahan	3.000.000.000
		3. Kewajiban Penjaminan	1.022.984.500
		a. Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara	977.523.000
		b. Percepatan penyediaan air minum	2.113.000
		c. Proyek Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	43.348.500

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u. b.

KEPALA BAGIAN T. U. KEMENTERIAN

Ar

GIARTO

NIP. 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PAGU DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

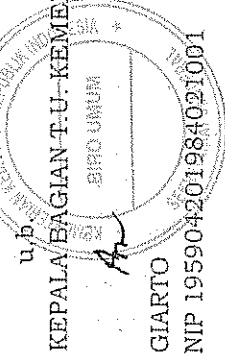
BAGIAN ANGGARAN : 999
UNIT ORGANISASI : 999.04 BA BUN PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN

(dalam ribuan rupiah)

BA	KODE		KEPERLUAN	JUMLAH
	UNIT ORG	PRO		
999	04	9	Program Penerusan Pinjaman	5.292.589.878
			1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	3.845.240.937
			2. PT Sarana Multi Infrastruktur	195.000.000
			3. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	22.425.000
			4. PT Pertamina (Persero)	1.032.010.000
			5. Pemerintah Kota Bogor	12.498.941
			6. Pemerintah Kabupaten Muara Enim	30.000.000
			7. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	155.415.000

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM



u.p.d
KEPALA BAGIAN T.U.-KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

tid.

MUHAMAD CHATIB BASRI



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

PAGU DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN : 999
 UNIT ORGANISASI : 999.05 BA BUN PENGELOLAAN BELANJA TRANSFER KE DAERAH

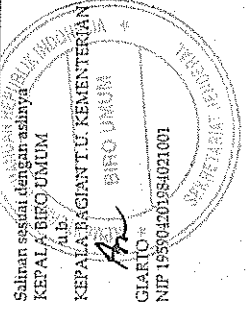
(dalam ribuan rupiah)

KODE		KEPERLUAN	JUMLAH
BA	UNIT PRO ORG		
999	05 10	Program Pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah	586.431.303.933
		1. Dana Perimbangan	481.802.401.433
		a. Dana Bagi Hasil (DBH)	107.392.960.213
		a.1 Pajak	52.727.375.590
		- Pajak Penghasilan	26.600.396.000
		- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23.952.979.590
		- Cukai Hasil Tembaku (CHT)	2.174.000.000
		a.2 Sumber Daya Alam (SDA)	54.665.584.623
		- Minyak dan Gas Bumi (Migas)	33.532.084.424
		- Pertambangan Umum	17.984.516.181
		- Kehutanan	2.535.626.891
		- Perikanan	200.000.001
		- Pertambangan Panas Bumi (PPB)	413.357.126
		b. Dana Alokasi Umum	341.409.441.220
		c. Dana Alokasi Khusus	33.000.000.000
		2. Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian	104.628.900.500
		a. Dana Otonomi Khusus	16.156.377.650



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE		KEPERLUAN	JUMLAH
BA	UNIT ORG PRO		
		a.1 Dana Otonomi Khusus	13.656.377.650
		- Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	6.828.188.825
		Provinsi Papua	4.779.732.178
		Provinsi Papua Barat	2.048.456.647
		- Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	6.828.188.825
		a.2 Dana Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur	2.500.000.000
		- Provinsi Papua	1.750.000.000
		- Provinsi Papua Barat	750.000.000
		b Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	523.875.000
		c Dana Penyesuaian	87.948.647.850
		a.1 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS Daerah	60.540.700.000
		a.2 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	24.074.700.000
		a.3 Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNS Daerah	1.853.600.000
		a.4 Dana Insentif Daerah (DID)	1.387.800.000
		a.5 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	91.847.850



Sahabat sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN TU KEMENTERIAN

GIARTO

NIP.19550420195021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

PAGU DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN : 999
 UNIT ORGANISASI : 999.07 BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE		KEPERLUAN	JUMLAH
BA	UNIT ORG PRO		
999	07 11	Program Pengelolaan Subsidi	336.241.827.453
		1. Energi	284.659.535.000
		a. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (<i>Liquefied Petroleum Gas/LPG</i> tabung 3 (tiga) kilogram dan <i>Liquefied Gas For Vehicle/LGV</i>)	194.893.055.000
		b. Subsidi Listrik	89.766.480.000
		2. Non Energi	51.582.292.453
		a. Subsidi Pangan	18.822.515.311
		b. Subsidi Pupuk	21.048.845.142
		c. Subsidi Benih	1.564.800.000
		d. Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/ <i>Public Service Obligation (PSO)</i>	2.197.096.000
		- PT KAI	1.224.306.800
		- PT Pelni	872.789.200
		- LKBN Antara	100.000.000

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam ribuan rupiah)

KODE		KEPERLUAN	JUMLAH
BA	UNIT ORG PRO		
		e. Subsidi Bunga Kredit Program	3.235.806.000
		f. Subsidi Pajak ditanggung Pemerintah (DTP)	4.713.230.000
		- Subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah (PPH-DTP)	3.713.230.000
		- Fasilitas Bea Masuk	1.000.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

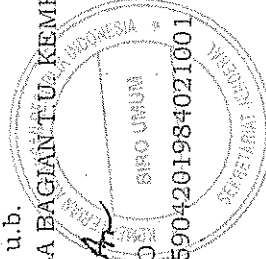
u. b.

ttd.

KEPALA BAGIAN TUJUH KEMENTERIAN

MUHAMAD CHATIB BASRI

GIARTO
BIRO UMUM
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

PAGU DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN : 999
 UNIT ORGANISASI : 999.08 BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

BA	UNIT ORG	PRO	KODE		KEPERLUAN	JUMLAH
999	08	12			Program Pengelolaan Belanja Lainnya	66.626.502.255
					1. Belanja Pegawai	34.680.001.680
					a. Gaji dan Tunjangan	399.076.840
					b. Honorarium, Vakasi dan Lain-lain	34.280.924.840
					2. Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000
					Dana Cadangan Bencana Alam	3.000.000.000
					3. Belanja Lain-lain	28.946.500.575
					a. Cadangan Risiko Perubahan Asumsi Makro dan Stabilisasi Harga	6.500.000.000
					- Cadangan Risiko Perubahan Asumsi Makro	4.000.000.000
					- Cadangan Stabilisasi Harga Pangan dan Ketahanan Pangan	2.500.000.000
					b. Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	30.000.000
					c. Operasional Lembaga Yang Belum Mempunyai BA	66.000.000
					Kawasan Bintan dan Karimun	66.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam ribuan rupiah)

BA	KODE		KEPERLUAN	JUMLAH
	UNIT ORG	PRO		
			d. Ongkos Angkut Beras PNS di Distrik Pedalaman Papua	91.937.401
			- Provinsi Papua	82.268.441
			- Provinsi Papua Barat	9.668.960
			e. Cadangan Beras Pemerintah	2.000.000.000
			f. Cadangan Benih Nasional	306.445.625
			g. Cetak Dapem PT Asabri ke-13	151.390
			h. Cadangan Keperluan Mendesak	4.000.000.000
			i. Cadangan Selisih Kurs	300.000.000
			j. Bantuan Operasional Layanan Pos Universal	322.689.000
			k. Tunggakan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) Kemhan/TNI Tahun 2006-2012	6.120.994.319
			l. Cadangan Pengamanan Pemilu 2014	1.000.000.000
			m. Cadangan Siklus 5 Tahunan MPR/DPR/DPD/Setneg/MK dan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014	3.000.000.000
			- Cadangan Siklus Lima Tahunan	453.200.000
			- Cadangan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014	2.546.800.000

A



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(dalam ribuan rupiah)

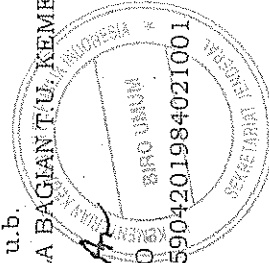
KODE		KEPERLUAN	JUMLAH
BA	UNIT ORG PRO		
		n. Cadangan BMP Kemhan/TNI Tahun 2014	2.500.000.000
		o. Cadangan untuk Operasional Kegiatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2014	2.408.282.840
		p. Cadangan Anggaran untuk Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2014	300.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

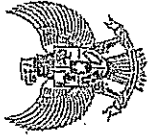
GIARTO
BIRO UMUM
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

PAGU DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ANGGARAN : 999
 UNIT ORGANISASI : 999.99 BA BUN PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE		KEPERLUAN	JUMLAH
BA	UNIT ORG PRO		
999	99 13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus	91.706.600.429
		1. Belanja Pegawai	90.527.587.929
		Kontribusi Sosial	90.527.587.929
		- Anggaran Manfaat Pensiun (PT Taspen)	75.317.801.612
		- Anggaran Manfaat Pensiun (PT Asabri)	10.371.084.890
		- Jaminan Pelayanan Kesehatan (PT Askes)	4.838.701.427
		2. Belanja Barang	1.179.012.500
		a. Kontribusi ke Lembaga Internasional	61.672.500
		- USAID Trust Fund	10.000.000
		- Islamic Solidarity Fund for Development (ISFD)	27.500.000
		- OPEC Fund for International Development (OFID)	2.090.000
		- Endowment Fund ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR)	1.182.500
		- Fasilitas Kerjasama Selatan-Selatan Bank Dunia	16.500.000
		- ASEAN+3 Macroeconomic and Research Office (AMRO)	4.400.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam ribuan rupiah)

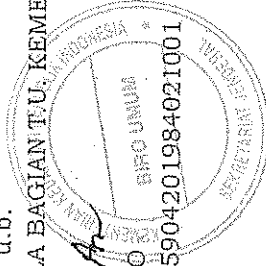
KODE		KEPERLUAN	JUMLAH
BA	UNIT ORG PRO		
		b. Cadangan Dana Dukungan Kelayakan/ <i>Viability Gap Fund</i> (VGF)	1.117.340.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TU. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

7